

## Peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik prasarana budidaya tambak : Studi kasus proyek fisheries support services

Yulianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=110260&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>LATAR BELAKANG</b><br>

Pembangunan Sub-Sektor Perikanan dilaksanakan secara bertahap melalui PELITA yang dimulai sejak tahun 1968. Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) telah berakhir pada tahun 1993 dilanjutkan dengan pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Tahap H (1993/1994 - 2018/2019) dengan PELITA VI sebagai awalnya. Orientasi pembangunan perikanan dalam REPELITA VI (1991/1994 - 1998/1999) dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas gizi pangan. masyarakat. Ikan dan udang adalah salah satu bahan makanan yang penting, sebagai salah satu sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah telah dan akan terns memberikan prioritas tinggi pada sub-sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan bare dalam PJPT II berdasar pada melimpahnya sumberdaya perikanan dan beralihnya pola konsumsi menuju protein tinggi dengan kandungan lemak yang relatif rendah (menu makan yang seimbang).

<br><br>

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81000 km, memiliki potensi yang besar untuk budidaya tambak, budidaya laut, dan penangkapan ikan. Tambak, merupakan salah satu usaha budidaya ikan dan udang di Indonesia memiliki areal yang paling luas, dari 172.054 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 332.365 ha di tahun 1995. Sedangkan luas areal kolam air tawar untuk budidaya ikan dan udang hanya meliputi areal 37.425 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 65.545 ha tahun 1995.